

BAB III PEMBERONTAKAN LASKAR - LASKAR ISLAM

A. Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, seperti masalah ekonomi, sosial, hubungan luar negeri maupun masalah pertahanan keamanan. Khusus dibidang pertahanan keamanan, muncul berbagai pemberontakan yang menentang Pemerintah RI yang sah. Salah satu pemberontakan tersebut yaitu pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, dengan pasukannya yang diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII).

Kartosuwiryo merupakan sosok sentral dibalik pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Ia telah sejak lama menginginkan terbentuknya suatu negara Islam yang dinamakan Darul Islam.¹ Upaya Kartosuwiryo dalam merealisasikan gambaran tentang negara Islam itu, mulai berlangsung setelah ditandatanganinya perjanjian Renville. Perjanjian tersebut, ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville, kapal milik Amerika Serikat.²

¹ Darul Islam berasal dari kata “Daar al-Islam” yang berarti wilayah atau negara yang didiami dan diperintah oleh orang-orang Islam serta didalamnya berlaku hukum-hukum Islam. Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1992, hlm.754.

² Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm.71.

Penandatanganan perjanjian Renville telah memecah belah kekuatan RI. Akibat dari perjanjian itu wilayah RI di pulau Jawa hanya meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Banten. Hal ini membawa akibat anggota tentara harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda dan harus pindah ke wilayah RI yang sempit. Tentara di daerah Jawa Barat yang telah menempati daerah yang strategis untuk melakukan gerilya, terpaksa harus segera melakukan hijrah³ ke daerah RI. Sebagian besar pasukan Divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pada waktu pasukan Divisi Siliwangi melaksanakan hijrah ke daerah Jawa Tengah, tidak semua kesatuan tentara ikut serta melakukan hijrah. Mereka yang tidak ikut hijrah terus melakukan perang gerilya di daerah Jawa Barat. Kesatuan tentara yang tidak ikut hijrah diantaranya ialah pasukan Sabilillah dan Hizbullah⁴ yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Melihat situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan segera Kartosuwiryo memanfaatkan keadaan. Pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya, ia beserta kawan seperjuangannya seperti

³ Hijrah artinya pindah. Hijrah adalah istilah yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk menyebut penarikan pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Renville, dengan harapan bahwa suatu waktu pasukan Divisi Siliwangi akan kembali ke daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Holk Harald Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm.64.

⁴ Hizbullah atau Tentara Allah adalah nama korps sukarelawan Islam pada masa pendudukan Jepang. Didirikan pada tanggal 8 Desember 1944 atas izin dari Jepang. Dalam bidang militer Hizbullah bertindak sebagai korps cadangan barisan Pembela Tanah Air (PETA) dalam perang melawan Sekutu. Sedangkan Sabilillah atau Jalan Allah, didirikan pada bulan November 1945. Kedua pasukan ini merupakan laskar Islam dari partai Masyumi. Corneles van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hlm.63.

Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang berhasil membentuk TII. Dimana anggota TII ini merupakan gabungan dari pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Organisasi militer TII yang dibentuk oleh Kartosuwiryo tersusun dalam bentuk satuan-satuan tingkat divisi, resimen, batalyon sampai pada satuan tingkat regu. Namun, dalam setiap taktik dan gerakannya, TII tidak pernah bergerak dalam satuan-satuan besar. Kegiatan mereka paling besar hanya sampai pada tingkat batalyon.⁵ Hal ini sejalan dengan siasat gerilya yang telah digariskan oleh mereka. Inti dari kekuatan TII terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang tidak mau masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, untuk menambah kekuatan tempur TII, pihak DI/TII merekrut pemuda-pemuda desa untuk dijadikan sebagai anggota TII. Sementara modal persenjataan TII diperoleh dari hasil rampasan perang, terutama pada waktu TII melakukan pertempuran-pertempuran melawan Tentara Belanda maupun melawan Tentara RI.

Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Malangbong, Jawa Barat.⁶ Melalui gagasannya Kartosuwiryo berusaha mengubah Konsep Tata Negara Republik menjadi Tata Negara Islam. Hal ini jelas menimbulkan berbagai reaksi, terutama dikalangan pemerintah pusat.⁷

⁵ Dinas Sejarah Militer TNI, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1985, hlm. 113.

⁶ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 25.

⁷ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm. 2.

Kartosuwiryo memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama yang kesempurnaan yang memberikan aturan terhadap segala aspek, pendidikan, pengajaran baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar, dari mengurus masalah rumah tangga hingga mengendalikan pemerintahan.

Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, dimana menurutnya setiap perjuangan politik harus berpegangan pada akidah politik, yaitu ideologi dan realistik. Kartosuwiryo juga menjelaskan bahwa suatu Negara Islam haruslah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik di dalam maupun di luar, secara *de facto*⁸ maupun secara *de jure*⁹ sehingga kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan Islam yang penuh, tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak manapun juga.

Menurut Kartosuwiryo suatu dasar negara haruslah tertanam dan hidup di dalam dada dan hati rakyat yang sebagian besar memeluk agama Islam. Sementara Pancasila tidak demikian, sejak berdirinya RI telah berpegang kepada pihak luar, pihak internasional. Tegasnya Pancasila tidak berakar ke dalam melainkan keluar, tidak berdiri di atas kekuatan dan tenaga rakyat sendiri, tidak

⁸ De facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Pengakuan ini diberikan berdasarkan realitas bahwa ada suatu masyarakat politik yang memenuhi ketiga unsur konstitutif seperti penduduk, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Sularto, *Haji Agus Salim (1884-1954): tentang perang, jihad, dan pluralisme*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.27.

⁹ De jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum dari negara lain. Bangsa yang telah mendapat pengakuan de jure akan diakui dalam dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat penuh. *Ibid.*

sesuai dengan kehendak rakyat, melainkan kedaulatan dan kemerdekaannya diperoleh dan dipertahankan dengan pegangan kepada pihak internasional dan berdasar atas kasih sayang dan kemurahan pihak lain.¹⁰

Selain itu Kartosuwiryo juga memandang bahwa dalam kenyataannya negara Pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, bahkan tak jarang membuangnya jauh-jauh. Oleh karena itu Kartosuwiryo menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah akan berjalan baik dalam negara yang bukan Islam, baik itu negara Komunis, Sosialis maupun negara Pancasila. Hukum-hukum Allah hanya akan berjalan baik dalam sebuah Negara Islam, dengan demikian Kartosuwiryo menolak Pancasila.

Hasil dari pemikiran Kartosuwiryo, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Kartosuwiryo Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar, lahir maupun batin, tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi lebih dari itu juga kehidupan akhirat, sehingga hubungan Islam dan negara adalah sentral, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara.¹¹

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah RI untuk menumpas pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo itu, pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai

¹⁰ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm. 79.

¹¹ Tahi Bonar Simatupang, Masalah Darul Islam dalam Rangka Strategi untuk Mempertahankan dan Mengkonsolidasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila, *Prisma*, No. 7, Tahun XVII, 1988. hlm. 76.

melancarkan operasi penumpasan akan tetapi belum mendapat hasil yang memuaskan. Meskipun telah diadakan operasi penumpasan akan tetapi umumnya operasi tersebut bersifat sporadis tanpa ada rencana penumpasan yang menyeluruh. Tanggal 5 juli 1959 operasi-operasi terhadap DI/TII Kartosuwiryo diintensifkan dengan mencetuskan doktrin perang wilayah. Dimana seluruh rakyat diikut sertakan sepenuhnya dalam pelaksanaan operasi penumpasan.¹² Sistemnya antara lain dikenal dengan Operasi Pagar Betis yang kemudian dilancarkan dengan operasi Baratayudha. Pelaksanaan operasi Baratayudha dilakukan oleh satuan KODAM VI Siliwangi, dibantu KODAM VII Diponegoro dan KODAM VIII Brawijaya.¹³

Tertangkapnya Kartosuwiryo dan sebagian besar pasukannya di daerah Gunung Geber tidak berarti keamanan di Jawa Barat telah pulih kembali. Beberapa anggota TII masih berkeliaran di hutan-hutan. Diantara anggota TII yang masih berada di hutan yaitu Agus Abdullah (Panglima KPWB 1/Jawa dan Madura), dan juga komandan pengawalnya yang bernama H. Syarif alias Ghozin.¹⁴ Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengajak pasukannya yang masih berkeliaran itu maka Mohammad Darda mengeluarkan suatu pengumuman yang

¹² Holk Harald Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm.185.

¹³ Dinas Sejarah Militer TNI, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1985, hlm.137.

¹⁴ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: Uswah, 2008, hlm.267-268.

ditujukan kepada seluruh anggota TII pada tanggal 6 Juni 1962.¹⁵ Seruan tersebut ditandatangani oleh Mohammad Darda. Ditentukan pula bahwa setiap anggota pasukan TII harus mendatangi pos-pos TNI terdekat. Sesudah dikeluarkannya seruan itu, sebagian besar anggota TII menyatakan kembali ke pangkuan RI. Akhirnya Agus Abdullah dan pengawalnya itu pun mematuhi seruan Mohammad Darda dan mereka berdua kemudian dijemput dengan sebuah helikopter di Gunung Ceremai (Majalengka) pada tanggal 1 Agustus 1962.¹⁶

Panglima Kodam VI Siliwangi, Kolonel Ibrahim Adji selaku komandan langsung yang memimpin Operasi Brata Yudha, menyerukan kepada setiap anggota TII yang masih berada di hutan, agar mereka menghentikan setiap kegiatannya dan segera turun serta melaporkan diri dengan membawa semua senjata dan alat perlengkapan lainnya demi keselamatan mereka dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Selain itu ia juga telah memerintahkan agar pos-pos TNI menerima anggota pasukan TII yang turun dari hutan-hutan. Diantara anggota-anggota TII yang turut menyerahkan diri ini terdapat sejumlah remaja berusia 10 sampai 12 tahun dengan seragam lengkap TII dengan membawa senjata mereka.¹⁷

¹⁵ Dinas Sejarah Militer TNI, *op.cit.*, hlm. 144.

¹⁶ Irfan S. Awwas, *op.cit.*, hlm. 268.

¹⁷ Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 195.

B. Pemberontakan Amir Fatah di Tegal

Pelaksanaan dari perjanjian Renville menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Daerah Tegal dan Brebes merupakan daerah perbatasan antara kekuasaan pemerintah RI dengan pihak Belanda. Sebagai daerah perbatasan maka secara otomatis daerah ini harus dikosongkan dari unsur-unsur militer sebagai akibat dari perjanjian Renville. Masyarakat Tegal menganggap kalau pemerintah kalau pemerintah Republik Indonesia menelantarkan mereka, karena telah mengosongkan daerah ini dari kekuatan militer. Keluarnya pasukan-pasukan RI membuat masyarakat Tegal menjadi tidak percaya dengan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia. Ketika pemerintahan baik kabupaten maupun pemerintahan kota Tegal kembali dari daerah pengungsian di Wonosobo ke daerah Tegal, sambutan rakyat pun agak sedikit berkurang.¹⁸ Pemerintahan ini mengungsi ke Wonosobo ketiga di Tegal terjadi Peristiwa Tiga Daerah, kemudian dilanjutkan dengan Agresi Militer Belanda I, dalam agresi militer ini Belanda berhasil menguasai daerah tegal dan sekitarnya. Adanya penyerangan ini berarti berarti perjanjian Renville sudah tidak berlaku lagi, sehingga baik kota maupun kabupaten Tegal berpindah ke daerah asalnya.

Pemerintah daerah Tegal belum dapat menata kembali pemerintahan yang baru kembali dari pengungsian secara optimal dan mereka harus menghadapi satu lawan baru. Lawan yang mereka hadapi adalah organisasi yang mengatasnamakan

¹⁸ Anton E Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi Dalam Revolusi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Press, 1989, hlm. 155.

sebuah organisasi Islam yaitu gerakan Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesiannya. Pemberontakan ini muncul sebagai akibat dari pengaruh gerakan DI/TII di Jawa Barat. Organisasi ini dapat berkembang pesat dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Tegal karena menggunakan slogan-slogan Islam dalam menjalankan aksinya. Rasa kurang percaya terhadap pemerintah menjadi faktor pemicu munculnya pemberontakan ini. Ketika gerakan ini mulai masuk di bawah pimpinan Amir Fatah, di daerah Tegal sedang tidak ada penguasa. Para bupati dan stafnya sedang mengungsi ke daerah Wonosobo sebagai akibat dari perjanjian Renville. Faktor ideologi yang dihembuskan oleh para pemimpin DI/TII juga menjadi dorongan yang cukup kuat di kalangan masyarakat Tegal untuk mendukung gerakan DI/TII.

Pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII merupakan suatu bentuk pergolakan di dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mengubah struktur tatanan pemerintahan yang telah dibentuk oleh pemerintahan yang sah pada waktu itu, menjadi sistem yang berlandaskan Islam.¹⁹ Pusat DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh SM. Kartosuwiryo. Kemudian pengaruhnya meluas ke luar daerah yaitu Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Gerakan tersebut telah dimulai pada tahun 1946 akibat perjanjian Renville, dimana pasukan-pasukan TNI harus meninggalkan kantong-kantong gerilya kemudian melaksanakan hijrah. Keputusan tersebut ditolak oleh Kartosuwiryo, karena politik yang demikian dianggap merugikan perjuangan. Oleh karena itu

¹⁹ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Fallah, 1999, hlm. 49.

pasukan Hizbullah dan Sabilillah tidak diizinkan meninggalkan Jawa Barat. Setelah pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan rencananya. Pada bulan Maret 1948 pasukan-pasukan itu membentuk gerakan dengan nama Darul Islam (DI) dan tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan Tentara Islam Indonesia (TII). Hukum yang berlaku di negara Islam itu ialah hukum Islam. Hal ini jelas bahwa NII tidak mengakui UUD 1945 dan Pancasila.

Pengaruh pemberontakan DI/TII S.M Kartosuwiryo di Jawa Barat. S.M. Kartosuwiryo sebagai Pimpinan DI/TII sekaligus Imam dan juga presiden Negara Islam Indonesia yang diproklamasikannya mempunyai kharisma dan pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat.²⁰ S.M Kartosuwiryo mulai melakukan perluasan pengaruhnya ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah seperti di daerah Brebes, Tegal, Pekalongan dan Majenang dengan segala keunggulan yang dimilikinya. Hubungan pribadi antara Kartosuwiryo dengan para pemimpin keagamaan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah telah dijadikan sarana oleh Kartosuwiryo untuk menyebarkan pengaruhnya.²¹ DI/TII itu kemudian memusuhi pasukan TNI dengan mengadakan pengadangan dan menyerang pasukan TNI yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dengan segala cara menyebarkan pengaruhnya ke Jawa Tengah.

²⁰ Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, Jakarta: Arya Guna, 1964, hlm. 33.

²¹ Anhar Gonggong, *Abdul Qahar Mudzakar: Dari Patriot Hingga Pemberontakan*. Jakarta: Gramedia Media Sarana. 1992. hlm. 28

Kartosuwiryo berhasil mempengaruhi Amir Fatah seorang tokoh dan mantan pemimpin laskar Hisbuzbullah di daerah Jawa Tengah. Amir Fatah pernah mendampingi Kartosuwiryo ke Malang sebagai pengawalnya dalam rangka untuk menghadiri sidang paripurna ke lima Komite Nasional Indonesia (KNI) pusat pada bulan Februari 1947. Antara Amir Fatah dan Kartosuwiryo mempunyai cita-cita yang sama yaitu mendirikan sebuah Negara Islam Indonesia. Cara yang ditempuh guna mewujudkan cita-citanya pun sama yaitu dengan jalan kekerasan senjata. Amir Fatah Wijayakusuma memproklamasikan sebuah Negara Islam Indonesia (NII) di desa Pangrasan²², Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes pada tanggal 28 April 1949 pukul 12.00 WIB sebagai tindak lanjut dari usahanya untuk mendirikan sebuah negara Islam. Tujuan utama dari gerakan DI/TII pimpinan Amir Fatah adalah untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia ini. Selain itu gerakan pemberontakan ini juga ingin menegakkan sebuah Negara Islam dengan menjalankan syariat Islam di dalamnya. Kedaulatan yang ingin ditegakkan oleh gerakan DI/TII adalah tidak dengan negara sekuler karena negara sekuler dianggap tidak menguntungkan umat Islam.

Pada waktu pemerintah melakukan demobilisasi pasukan-pasukan dan laskar yang ada di daerah-daerah, salah satunya adalah di daerah Tegal. Program pemerintah yang berupa nasionalisasi pasukan menjadi pasukan resmi ternyata menimbulkan masalah baru di kalangan laskar-laskar yang ada di daerah ini. Pemerintah melakukan standarisasi bahwa pasukan yang akan direkrut menjadi

²² A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid III*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 237.

pasukan TNI harus bisa membaca dan menulis, dan lebih diutamakan mereka yang mengecam bangku pendidikan. Kebanyakan anggota pasukan dan laskar yang ada di daerah Tegal tidak pernah mengecam bangku pendidikan. Laskar-laskar di daerah Tegal menganggap kalau program tersebut hanyalah salah satu cara untuk melucuti senjata yang dimiliki oleh mereka, karena yang tidak lolos seleksi harus menyerahkan senjata yang dimilikinya.

Adanya program pemerintah ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dari anggota pasukan dan laskar-laskar yang ada di daerah ini. Bagi anggota pasukan liar yang masuk dalam proses demobilisasi, pasukan tersebut tetap merasa khawatir kalau nantinya mereka dinomor duakan dalam satuan TNI. Banyak di antara anggota pasukan dan laskar yang sudah masuk ke dalam pasukan TNI mengundurkan diri. Rasa kekecewaan di kalangan pasukan dan laskar di daerah Tegal telah memuncak, dan sebagai akhirnya bersama-sama dengan pasukan dan laskar-laskar yang ada di daerah Brebes membentuk sebuah organisasi dengan nama Majelis Islam. Organisasi secara terang-terangan mendukung gerakan DI/TII pimpinan Amir Fatah, dan setiap anggota Majelis Islam adalah anggota DI/TII pimpinan Amir Fatah.²³

Pemberontakan DI/TII di Tegal tidak lepas dari pengaruh seorang Amir Fatah, bahkan kontrol dari gerakan ini langsung dari perintah Amir Fatah. Masyarakat Tegal merupakan masyarakat yang fanatik terhadap agama Islam. Jika ada gerakan yang mengkaitkan Islam maka pasti akan mendapat dukungan.

²³ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm. 126.

Banyak masyarakat Tegal yang mendukung gerakan ini karena menganggap bahwa negara Republik Indonesia adalah negara komunis sehingga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya memeluk agama Islam. Amir Fatah berhasil mengeksploitasi sentimen agama Islam di kalangan masyarakat dan mengobarkannya menjadi fanatisme untuk mendapatkan dukungan rakyat yang lebih besar. Taktik dengan menggunakan dalih agama, Amir Fatah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perang membela Islam melalui gerakan DI/TII. Doktrin Amir Fatah adalah untuk memusuhi dan bila perlu membunuh pasukan TNI yang dianggap kafir dan kepada masyarakat dijanjikan akan masuk surga. Alam pikiran masyarakat Tegal yang masih sangat sederhana dan didukung oleh keadaan politik yang kacau sebagai akibat sikap kompromi dengan pihak Belanda dipergunakan dengan sangat baik dan rapi oleh Amir Fatah untuk menanamkan pengertian yang keliru kepada masyarakat tentang pemerintah RI.²⁴ Kondisi masyarakat Tegal yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan umum yang rendah dan hanya pelajaran agama Islam yang mereka pelajari secara mendalam membuat mereka menjadi masyarakat yang fanatik terhadap agama dan percaya pada doktrin-doktrin Darul Islam.

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah di pimpin Amir Fatah. Daerah operasinya di daerah Pekalongan, Tegal dan Brebes dimana daerah tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam yang fanatik. Pada waktu daerah pendudukan Belanda terjadi kekosongan, maka pada bulan Agustus 1948 Amir Fatah masuk ke

²⁴ A. H. Nasution, *Pokok-pokok Perang Gerilya Dan Pertahanan RI Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa, 1989, hlm. 54.

daerah pendudukan Belanda di Tegal dan Brebes dengan membawa 3 kompi Hizbullah. Amir Fatah masuk daerah pendudukan melalui Sektor yang dipimpin oleh Mayor Wongsoatmojo. Mereka berhasil masuk dengan kedok untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan mendapat tugas istimewa dari Panglima Besar Sudirman untuk menyadarkan Kartosuwiryo.

Amir Fatah setelah tiba di daerah pendudukan Belanda di Pekalongan dan Brebes kemudian melepaskan kedoknya untuk mencapai tujuan. Dengan jalan intimidasi dan kekerasan berhasil membentuk organisasi Islam yang dinamakan Majelis Islam (MI) mulai tingkat dewasa sampai karesidenan. Disamping itu menyusun suatu kekuatan yaitu Tentara Islam Indonesia (TII) dan Barisan Keamanan serta Pahlawan Darul Islam (PADI). Dengan demikian di daerah pendudukan, Amir Fatah telah menyusun kekuatan DI di Jawa Tengah.

Sementara itu Mayor Wongsoatmojo pada bulan Januari 1949 masuk daerah pendudukan Belanda di Tegal dan Brebes dengan kekuatan 4 kompi. Kemudian diadakan perundingan dengan pimpinan Majelis Islam (MI) yang diawali Amir Fatah. Dengan perundingan itu dapat dicapai suatu kerjasama antara pemerintah militer dengan MI juga antara TNI dengan pasukan Hizbullah dan Amir Fatah diangkat menjadi Ketua Koordinator daerah operasi Tegal-Brebes.²⁵

Dibalik itu semuanya Amir Fatah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyusun kekuatan TII dan DI-nya. Usaha untuk menegakkan kekuasaan di Jawa Tengah semakin nyata. Lebih-lebih setelah datangnya Kamran Cakrabuana

²⁵ Tashadi, *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, Yogyakarta: Bhakti Utama, 1997, hlm. 225.

sebagai utusan DI/TII Jawa Barat untuk mengadakan perundingan dengan Amir Fatah maka keadaan berkembang dengan cepat. Amir Fatah diangkat Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal TII. Sejak itu Amir menyerahkan tanggung jawab dan jabatannya selaku Ketua Koordinator daerah Tegal-Brebes kepada Komandan SKS (Sub Wherkraise) III. Ia mengatakan bahwa Amir Fatah dengan seluruh kekuatan bersenjata tidak terikat lagi dengan Komandan SWKS III.

Amir Fatah merupakan tokoh yang melahirkan DI/TII di Jawa Tengah. Semula Amir Fatah setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.²⁶

Gerakan DI/TII Amir Fatah muncul setelah Agresi Militer Belanda II, yang ditandai dengan diproklamasikannya NII di desa Pengrasan, tanggal 28 April 1949. Gerakan ini didukung oleh Laskar Hisbullah dan Majelis Islam (MI), yang

²⁶ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, Semarang: Borobudur Megah, 1977, hlm. 456.

merupakan pendukung inti gerakan, serta massa rakyat yang mayoritas terdiri dari para petani pedesaan. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memberikan dukungannya kepada DI/TII karena alasan ideologi, yaitu memperjuangkan Ideologi Islam dengan mengakui eksistensi Negara Islam Indonesia (NII).²⁷

Upaya-upaya untuk melaksanakan cita-citanya di Jawa Tengah, DI mengadakan teror terhadap rakyat dan TNI yang sedang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa berat perjuangan TNI di daerah SWKS III, karena harus menghadapi dua lawan sekaligus yaitu Belanda dan DI/TII pimpinan Amir Fatah. Kemudian pasukan DI mengadakan penyerbuan terhadap markas SWKS III di Bentarsari. Pada waktu itu pula terjadilah pembunuhan massal terhadap satu Regu Brimob pimpinan Komisaris Bambang Suprpto.²⁸ Pukulan teror DI di daerah SWKS III membuat kekuatan TNI menjadi terpecah belah tanpa hubungan satu sama lain. Akibatnya teror DI tersebut, daerah SWKS III menjadi gawat.

Usaha untuk mengatasi keadaan ini Letkol Moch. Bachrun Komandan Brigade 8/WK I mengambil tindakan mengkonsolidasikan SWKS III yang telah terpecah-pecah. Kemudian diadakan pengepungan terhadap pemusatan DI.²⁹ Gerakan selanjutnya dilaksanakan dalam fase ofensif. Gerakan tersebut berhasil memecah belah kekuatan DI/TII sehingga terjadi kelompok-kelompok kecil.

²⁷ Dinas Sejarah Militer TNI, *Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan Penumpasannya*, Bandung: Disjarah TNI AD, 1982, hlm. 3.

²⁸ Mabes ABRI Pusat, *Sejarah Dab Tradisi ABRI: 30 Tahun ABRI*, Jakarta: Pusjarah ABRI, 1990, hlm. 202.

²⁹ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm. 134.

Akibat terpecahnya kekuatan DI menjadi kelompok-kelompok kecil tersebut akhirnya gerakan mereka dapat dipatahkan. Gerakan itu dilaksanakan siang dan malam, sehingga kedudukan mereka terdesak. Dalam keadaan moril pasukan tinggi, datang perintah penghentian tembak-menembak dengan Belanda. Akhirnya menghasilkan KMB yang keputusan-keputusannya harus dilaksanakan oleh TNI antara lain penggabungan KNIL dengan TNI. Dalam situasi TNI berkonsolidasi, Amir Fatah mengambil kesempatan untuk menyusun kekuatan kembali. Kekuatan baru itu memilih daerah Bumiayu menjadi basis dan markas komandonya. Setelah mereka kuat mulai menyerang pos-pos TNI dengan cara menggunakan massa rakyat.

Upaya untuk mencegah DI Amir Fatah agar tidak meluas ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah, maka diperlukan perhatian khusus. Kemudian Panglima Divisi III Kolonel Gatot Subroto³⁰ mengeluarkan siasat yang bertujuan memisahkan DI/TII Amir Fatah dengan DI/TII Kartosuwiryo, menghancurkan sama sekali kekuatan bersenjataanya dan membersihkan sel-sel Darul Islam dan pimpinannya. Dengan dasar instruksi siasat itu maka terbentuklah Komando Operasi Gerakan Banteng Nasional (GBN).³¹

³⁰ Kolonel Gatot Subroto adalah gubernur militer untuk wilayah Jawa Tengah berdasarkan pengangkatan panglima-panglima Divisi Jawa. Dalam struktur pemerintahan militer yang baru, gubernur militer merupakan penguasa tertinggi. Lihat Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 93.

³¹ Dinas Sejarah Militer TNI, *Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan Penumpasannya*, Bandung: Disjarah TNI AD, 1982, hlm. 114.

Pimpinan Operasi GBN yang pertama Letkol Sarbini, kemudian diganti oleh Letkol M. Bachrun dan terakhir Letkol A. Yani. Dalam kepemimpinan Letkol A. Yani untuk menumpas DI Jawa Tengah dan gerakan ke timur dari DI Kartosuwiryo yang gerakannya meningkat dengan melakukan teror terhadap rakyat, maka dibentuk pasukannya yang disebut Banteng Raiders. Kemudian diadakan perubahan gerakan Banteng dari defensif menjadi ofensif. Gerakan menyerang musuh dilanjutkan dengan fase pembersihan. Dengan demikian tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk menetap dan konsolidasi di suatu tempat. Operasi tersebut telah berhasil membendung dan menghancurkan ekspansi DI ke timur, sehingga rakyat Jawa tengah tertindar dari bahaya kekacauan dan gangguan keamanan dari DI/TII.

C. Konflik AUI dengan Pemerintah Indonesia

Angkatan Umat Islam (AUI) adalah organisasi kelaskaran yang didirikan di Kebumen pada tanggal 11 September 1945. Dalam perkembangannya, AUI menjadi suatu organisasi yang beraliran Islam yang berdiri sendiri pada bulan Oktober 1945. Pendiri Organisasi ini adalah Moh. Sjafei, Saebani, Kiai Affandi dan Kiai Mahfud Abdulrahman. Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin Kiai Mahfud merupakan badan kelaskaran yang berpaham Islam yang kebanyakan anggotanya berasal dari daerah Kebumen dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan dengan cara

yang diperintahkan Allah dan ditunjukkan Rasul. Tujuan lain AUI adalah untuk mengkonsolidasikan kesetiaan masyarakat Islam kepada Islam.³²

Berkat pengaruh dan kharisma Islam Kiai Mahfud berangsur-angsur pasukan AUI menjadi sangat besar. Dalam melaksanakan ideologi dan cita-citanya, Kiai Mahfud dibantu H. Nursidik yang menjabat sebagai panglima AUI dan Kiai Taifur sebagai tangan kanannya. Karena begitu besarnya pengaruh Kiai Mahfud terhadap pengikut-pengikutnya timbul *fanatisme*³³ dan *bapakisme*³⁴ di daerah Kebumen.

Angkatan Umat Islam berjuang dan bergerak sendiri. Ketika Masyumi yang merupakan satu-satunya partai Islam mengajak Kiai Mahfud masuk menjadi anggotanya, Kiai Mahfud menolak dengan alasan AUI adalah kesatuan militer dan bukan organisasi politik. Dalam perjuangan untuk kemerdekaan, AUI bahu membahu dengan Tentara Republik Indonesia. AUI memperoleh peranan penting dalam melucuti pasukan Jepang di Kebumen pada tahun 1945. Selama masa revolusi, pasukan AUI selalu berhasil mempertahankan posisinya dan tidak pernah menderita kekalahan saat menghadapi Belanda.

³² Wawancara KH. Musyafa Ali tanggal 31 Mei 2014.

³³ Fanatisme adalah suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat sesuatu, dalam berfikir dan memutuskan, dalam mempersepsi dan memahami sesuatu dengan cara yang berlebihan dan tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan. Lihat A. Supratiknya, *Psikologi Kepribadian: Teori Teori Psikodinamik*. Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 38.

³⁴ Bapakisme adalah praktik hubungan pemimpin dan bawahan yang meniru pola hubungan bapak dan anak, kebiasaan mengagung-agungkan pemimpin (atasan). Lihat Hendri Supriyatmono, *Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*. Surakarta: Pustaka Nusatama, 1994, hlm. 52.

Salah satu tujuan yang dianut AUI pada saat pembentukannya adalah terciptanya suatu negara Indonesia berdasarkan prinsip - prinsip Islam. Namun hal itu tidak terjadi pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Sesudah Konferensi Meja Bundar timbul pertentangan antara AUI dengan RI karena syarat-syarat yang disepakati dalam KMB ditolak AUI. Pembangkangan pihak AUI terhadap perintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh alat - alat negara menimbulkan ketegangan-ketegangan antara pihak AUI dengan RI. Pertentangan yang timbul kemudian diperbesar oleh upaya-upaya Pemerintah untuk mengekang pengaruh AUI di Kebumen.

Beberapa usaha dilakukan Tentara Republik untuk dapat menguasai organisasi AUI. Salah satunya adalah dengan memberikan imbalan akan jasa AUI dalam perjuangan melawan Belanda. Badan ini diubah menjadi batalyon daerah pada tahun 1949 dengan nama Batalyon Lemah Lanang³⁵. Sesungguhnya siasat ini dibuat sebagai jalan untuk menetapkan AUI di bawah kekuasaan dan mempersiapkannya untuk *demobilisasi*³⁶. Batalyon itu dipimpin Mustafa sebagai Komandannya dan adik laki - laki Kiai Mahfud yang bernama Nursidik sebagai orang keduanya.

³⁵ Nama Batalyon Lemah Lanang diambil dari nama Gunung Lemah Lanang yang terletak di sebelah utara Somalangu. Di Gunung Lemah Lanang di makamkan leluhur Kiai Mahfud yaitu Kiai Abdul Kahfi. K Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

³⁶ Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Batalyon Lemah Lanang selanjutnya terdiri dari anggota-anggota bekas satuan Hizbullah, yang ketika itu disebut pasukan Surengpati di bawah pimpinan Masduki. Walaupun kedua komponen Batalyon Lemah Lanang itu sama-sama berprinsip Islam tetapi pasukan AUI dan pasukan Surengpati tidak dapat berbaikan satu sama lainnya. Sering terjadi perselisihan antara pasukan AUI dan pasukan Surengpati sebelum mereka digabungkan dalam satu batalyon.³⁷

Kiai Mahfud dan para pengikutnya menganggap peleburan dengan pasukan Surengpati sebagai pukulan terhadap identitas mereka. Setelah batalyon itu terbentuk segera terjadi permusuhan antara kedua komponen itu dan Batalyon Lemah Lanang itu pun pecah.

Bagi Kiai Mahfud ini berarti berakhirnya semua kerjasama dengan Republik Indonesia. Kiai Mahfud masih belum memisahkan diri secara resmi tetapi dia dan pengikutnya lalu memundurkan diri ke Somalangu. Nursidik menempuh jalan lain dan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik. Hal itu mengakibatkan pecahnya AUI dan antara pasukan Kiai Mahfud dan pasukan Nursidik untuk sementara berjalan sendiri-sendiri.

Pengunduran diri Kiai Mahfud menyebabkan kegagalan upaya untuk menggabungkan AUI ke dalam tentara RI. Bersamaan dengan itu menjadi jelas pula bagi satuan-satuan di bawah pimpinan Nursidik yang tetap setia kepada Republik Indonesia. Nursidik dan pasukannya beranggapan bahwa pembentukan Batalyon Lemah Lanang bukan sekedar perubahan nama dan imbalan jasa bagi

³⁷ Arsip Biro Informasi Staff Angkatan Darat (BISAP) Berita Documentatie Sekitar Angkatan Oemat Islam (Djilid I, 1950) Djakarta, 10 Mei 1952.

usaha-usaha perlawanan gerilya terhadap Belanda tetapi guna memperbesar pasukan RI di Kebumen.³⁸

Tentara Republik mempunyai rencana mendidik kembali pasukan-pasukan AUI dengan maksud menanamkan semangat militer dalam diri mereka dan untuk membuatnya kukuh di bawah kekuasaannya. Rencana ini merupakan bagian dari rencana para pemimpin tentara RI untuk mengefisiensikan seluruh tentara menjadi angkatan yang relatif lebih kecil tetapi terdidik secara baik. Tentara Republik menganggap anggota-anggota satuan gerilya liar tidak ada tempat dalam organisasi militer. Prajurit-prajurit AUI dianggap terlalu rendah menurut ukuran kemiliteran, fisik, dan kecerdasan. Sesungguhnya yang Tentara Republik inginkan ialah anggota-anggota Angkatan Umat Islam dikembalikan ke kehidupan sipil sesudah pertempuran berakhir. Untuk tujuan inilah mereka ingin mengubah Batalyon Lemah Lanang menjadi batalyon cadangan. Di sinilah para gerilyawan harus menaati berlakunya seleksi untuk menjadi tentara dan apabila tidak mencapai ukuran yang ditentukan maka akan didemobilisasikan.

Demobilisasi dapat dilaksanakan secara serentak atau bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan pemanfaatan bagi kelanjutan pembangunan nasional yaitu dengan mengutamakan pulihnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi

³⁸ Wawancara KH. Qomari Abdurrahman tanggal 28 Maret 2014.

masyarakat. Pimpinan penyelenggaraan demobilisasi adalah penguasa keadaan bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁹

Upaya baru untuk memecah kekuatan daerah Angkatan Umat Islam dilakukan setelah pengakuan kemerdekaan secara resmi. Pada waktu itu, AUI sudah bertindak dengan kekuasaannya sendiri. AUI sudah mulai memunguti pajak, membeli senjata dan melakukan patrol daerah.⁴⁰ Tanggal 17 Mei 1950 dalam Batalyon Lemah Lanang sekali lagi direorganisasikan dan secara resmi dimasukkan kedalam Divisi III Diponegoro sebagai Batalyon IX Brigade X.⁴¹

Hanya sebagian kecil dari anggota Batalyon Lemah Lanang yang sesungguhnya masuk di dua kompi Divisi III Diponegoro. Kiai Mahfud sama sekali tidak mau tahu tentang penggabungan itu. Untuk memperlihatkan ketidakpuasan hatinya terhadap kebijaksanaan Pemerintah dan tentara RI, Kiai Mahfud tidak menghadiri upacara pelantikan. Tanda ketidaksetujuan dan protes Kiai Mahfud ditunjukkan dengan pembentukan satuan militer yang dinamakan Batalyon Khimayatul Islam (Pelindung-pelindung Islam) pada 27 Mei 1950.⁴² Mayoritas anggota AUI mengikuti dan masuk dalam batalyonnya. Hanya sebagian

³⁹ Permenhan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Dephan dan TNI.

⁴⁰ Arsip Kepolisian Negara RI (1947-1949) Bundel No. 400 : Laporan Kepolisian Tahun 1947

⁴¹ Cornelis Van Dijk, *op.cit.*, hlm. 137

⁴² Danar Widiarta, Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen. *Jurnal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 38.

kecil pasukan AUI yang tidak ikut dan mengikuti Nursidik yang telah diangkat menjadi komandan Batalyon IX oleh Tentara Republik Indonesia.

Reaksi Kiai Mahfud tidak menjadi kejutan bagi anggota Batalyon Lemah Lanang. Anggota-anggota Batalyon Lemah Lanang sudah merasa bahwa pembentukan batalyon yang baru akan menuju pada pelucutan senjata dan demobilisasi. Polisi Militer sejak Januari 1950 sudah berusaha mendisiplinkan pengikut-pengikut Kiai Mahfud tetapi usahanya gagal. Staf Divisi Siliwangi tidak sama sekali mengacuhkan bagaimana perasaan para gerilyawan AUI tentang perlakuan terhadap mereka maupun reaksi mereka. Panglima Divisi Diponegoro yaitu Kolonel Gatot Subroto telah mengirimkan sepucuk surat kepada Kiai Mahfud. Isi surat itu adalah ucapan terima kasih akan sumbangan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan untuk semua kerja sama Kiai Mahfud dalam memastikan pasukan AUI sebagai Tentara Republik.⁴³

Tentara dan Pemerintah RI berusaha berunding dengan Kiai Mahfud pada bulan-bulan berikutnya tetapi tidak berhasil. Undangan untuk datang ke Purworejo membicarakan segala persoalan ditolak oleh Kiai Mahfud. Pihak Kiai Mahfud pun menolak menerima wakil-wakil Pemerintah maupun dari pihak Tentara Republik yang ingin mendatangnya di Somalangu. Kiai Mahfud juga tidak setuju untuk bicara dengan wakil-wakil Masyumi. Selain itu, Kiai Mahfud juga menolak bertemu dengan K.H. Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Serikat. K.H. Wahid Hasyim yang pergi ke Jawa Tengah khusus untuk berbicara dengan para pemberontak dan mengajak

⁴³ Cornelis Van Dijk, *loc.cit.*

mereka menghentikan perlawanannya. Musyawarah yang diajukan untuk menyelesaikan pertikaian paham antara kedua belah pihak untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diinginkan ditolak oleh AUI.

Angkatan Umat Islam mulai membuat peraturan-peraturan khususnya mengenai *ketataprajaan*⁴⁴ yang sifatnya lepas dan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah RI setempat. Para petugas Pemerintah khususnya pamong praja mulai mendapat kesulitan-kesulitan sejak itu. Timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat di daerah Kebumen. Tentara Republik Indonesia Serikat dijuluki Kiai Mahfud sebagai tentara *Kebo Putih*⁴⁵ dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Pengikut Kiai Mahfud dilarang menggunakan salam nasional yang berbunyi merdeka sejak 1949. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan ketidakpuasannya tentang diplomasi Pemerintah Republik Indonesia yang menurut pandangan Kiai Mahfud gagal mencapai kemerdekaan yang sepenuhnya. Di samping itu, Kiai Mahfud dan pengikut-pengikutnya mencurigai Tentara Republik telah diinfiltrasi para perwira komunis yang terlibat dalam pemberontakan Madiun.

⁴⁴ Tata praja adalah penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketataprajaan adalah perihal tata praja pemerintahan negara. Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁴⁵ Kebo putih berarti kerbau putih dalam bahasa Jawa. Kata itu adalah kata makian masyarakat Kebumen kepada Belanda. Cornelis van Dijk, *op.cit.*, hlm. 137.

Terjadi pertempuran pada tanggal 30 Juli 1950 antara pasukan AUI Kiai Mahfud dengan Tentara Republik Indonesia.⁴⁶ Pembangkangan AUI terhadap peraturan-peraturan Pemerintah RI dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah. Dari gejala - gejala yang nampak, menunjukkan bahwa AUI telah berkembang sejalan dan senafas dengan cita - cita pembentukan Negara Islam *konsepsi*⁴⁷ Kartosuwiryo. Pemerintah RI terpaksa mengerahkan segala alat kekuasaannya dan mengambil tindakan tegas terhadap AUI pada tanggal 30 Juli 1950.⁴⁸ Pertempuran itu terjadi sehari sebelum berakhirnya suatu ultimatum dari Tentara Republik. Bupati Kebumen dan pejabat-pejabat pemerintahan serta pamong praja terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Pasukan Kiai Mahfud semakin bertambah besar setelah dibantu oleh Nursidik dan sebagian besar prajurit yang telah masuk Tentara Republik Indonesia Serikat pada bulan Mei.⁴⁹ Nursidik kemudian diangkat sebagai komandan dalam pemberontakan AUI tersebut. Bekas pasukan Surengpati di bawah pimpinan Masduki yang sebagian besar anggotanya berasal dari Cilacap dengan segera mereka bergerak ke daerah asalnya untuk mengobarkan pemberontakan di daerahnya.

⁴⁶ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, Semarang: Borobudur Megah, 1977, hlm. 471.

⁴⁷ Konsepsi adalah semua ide, paham/pendapat, pikiran/cita-cita, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Gail Wiscart Stuart, *Prinsip Dan Praktek Psikiatri*. Jakarta: EGC, 2002, hlm. 318.

⁴⁸ Dinas Sejarah Militer Kodam VII / Diponegoro. *loc.cit.*

⁴⁹ Gerakan pemberontakan ini juga diikuti oleh satuan kecil Hizbullah yang berjumlah 40 orang yang merupakan bagian satuan Surengpati. Cornelis van Dijk, *op.cit.*, hlm. 138.

Tentara Republik mulai menumpas pemberontakan AUI pada tanggal 1 Agustus 1950. Pertempuran pertama terjadi di selatan Stasiun Kebumen dimana dengan cepat pasukan RI berhasil menguasai keadaan. Pasukan AUI yang dipukul mundur bertahan di Taman Winangun. Pengejaran dan pengepungan terus dilakukan oleh Tentara Republik. Pertempuran lain juga terjadi di desa Depakrejo, Muntirejo, Sidomargo dan disebelah timur serta utara kota Kebumen.⁵⁰

Tekanan berat yang pasukan AUI terima dari serangan Tentara Republik mengakibatkan mereka mengundurkan diri ke daerah Somalangu dan membentuk pertahanan yang kuat disana. Tentara Republik mulai melucuti senjata semua bekas gerilyawan AUI yang tidak melarikan diri dan melanjutkan penyerangan ke desa Somalangu.

Gempuran-gempuran Tentara Republik mengakibatkan pasukan AUI mundur lagi dan berusaha mendirikan suatu pertahanan di desa Sadang kecamatan Alian. Sambil mengundurkan diri, pasukan AUI melakukan pembakaran rumah - rumah penduduk dan menghancurkan jembatan-jembatan untuk menghambat gerakan pasukan RI. Selama 40 hari bertempur, Sekitar 85 rumah di Somalangu mengalami kerusakan dan hancur dalam pertempuran itu. Jumlah korban jiwa akibat perang diperkirakan mencapai 1.500-2.000 jiwa.⁵¹

Pasukan AUI kemudian terpecah menjadi dua. Kelompok yang dipimpin Nursidik dengan kekuatan sekitar 200 orang bergerak menuju ke daerah Brebes

⁵⁰ Danar Widiarta, Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen. *Jurnal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 39.

⁵¹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 122.

dan Tegal untuk bergabung dengan DI/TII Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fatah. Kiai Mahfud beserta pengikutnya tetap bertahan di daerah Banyumas dengan kekuatan sekitar 600 orang. Nursidik tewas tertembak di dekat Kroya pada tanggal 26 Agustus 1950. Sisa-sisa pasukannya melarikan diri ke Brebes dan Tegal.⁵²

Satuan-satuan batalyon tentara RI digabungkan pada tanggal 10 September 1950 untuk menumpas tentara AUI. Batalyon Mayor Sruhardoyo, Batalyon Sutarno, dan Batalyon Suryosumpeno digerakkan ke arah barat dan utara untuk selanjutnya masuk ke daerah Kebumen dengan tujuan mengisolir⁵³ dan menghancurkan pasukan AUI disana. Pasukan Brimob, Polisi dan Polisi Militer melanjutkan pembersihan di daerah Kebumen. Kampanye-kampanye dari Dinas Penerangan dilakukan dengan lebih intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh propaganda pemberontak di kalangan rakyat.

Fase terakhir penumpasan gerakan AUI oleh Tentara Republik tidak banyak mengalami kesulitan. Moril pasukan AUI turun akibat pengejaran dan gempuran Tentara RI yang terus menerus. Banyak pasukan AUI yang menderita luka-luka akibat pertempuran dan persediaan makanan mereka yang menipis. Kiai Mahfud menderita luka yang cukup parah saat dia dan pasukannya melarikan diri ke Gunung Srandil di daerah Cilacap. Pertempuran di Gunung Srandil

⁵² Cornelis Van Dijk, *op.cit.*, hlm. 138.

⁵³ Mengisolir adalah proses mengisolasi. Isolasi adalah pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan atau mengasingkan manusia dari manusia lain. James M. Heslin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006, hlm.18.

menewaskan Kiai Mahfud bersama sejumlah anak buahnya. Puluhan orang berhasil ditawan dan sisa-sisa pasukan AUI melarikan diri ke Gombong dan Brebes. Sisa pasukan AUI yang berhasil melarikan diri ke Brebes kemudian bergabung dengan pasukan DI/TII Jawa Tengah.⁵⁴

⁵⁴ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, Semarang: Borobudur Megah, 1977, hlm. 474